

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KESBANGPOL
JL. SUNAN MURIA NO. 04
SUMBER



Dra. Hj. Ita Rohpitasari, M.Si
Kepala Bakesbangpol



Dicky Poernama Sidiq, SH., MH
Sekretaris Bakesbangpol



Drs. H. Imron Rosyadi, M.Ag
Bupati Cirebon



Hj. Ayu Tjiptaningsih, SE., M.Si
Wakil Bupati Cirebon

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon dapat diselesaikan.

Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No 7 Tahun 1999 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024.

Dengan tersusunnya LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2023 ini, maka kami menyampaikan terimakasih kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LAKIP ini, kami juga menyampaikan terimakasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama Tahun 2023.

Penyusunan LAKIP ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon dapat mencerminkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Sumber, Februari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Cirebon,



Dra. Hj. ITA ROHPITASARI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660810 198709 2 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja selama Tahun 2023. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 4 (Empat) sasaran dengan kegiatan sebanyak 11 (sebelas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan .

Kategori capaian sasaran yang berhasil sebanyak 4 (empat) sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa capaian sebagian besar sasaran program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sudah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang akan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	4
A. STRUKTUR ORGANISASI	4
B. FUNGSI DAN TUGAS	6
C. ISU STRATEGIS	8
D. KEADAAN PEGAWAI	10
E. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA	15
F. KEUANGAN	19
G. SISTEMATIKA	20
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	22
A. PERENCANAAN STRATEGIS	22
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	37
C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023	39
D. INSTRUMEN PENDUKUNG	41
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	46
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023	46
B. EVALUASI ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN	47
C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA LAINNYA	54
D. REALISASI ANGGARAN	66
E. INOVASI	71
BAB IV. PENUTUP	72
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 31) tanggal 03 Januari 2022.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi Kewenangan Daerah. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon adalah Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2022 tentang penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa dan politik, dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, aman dan nyaman diperlukan stabilitas daerah yang kondusif, dari ancaman dan konflik

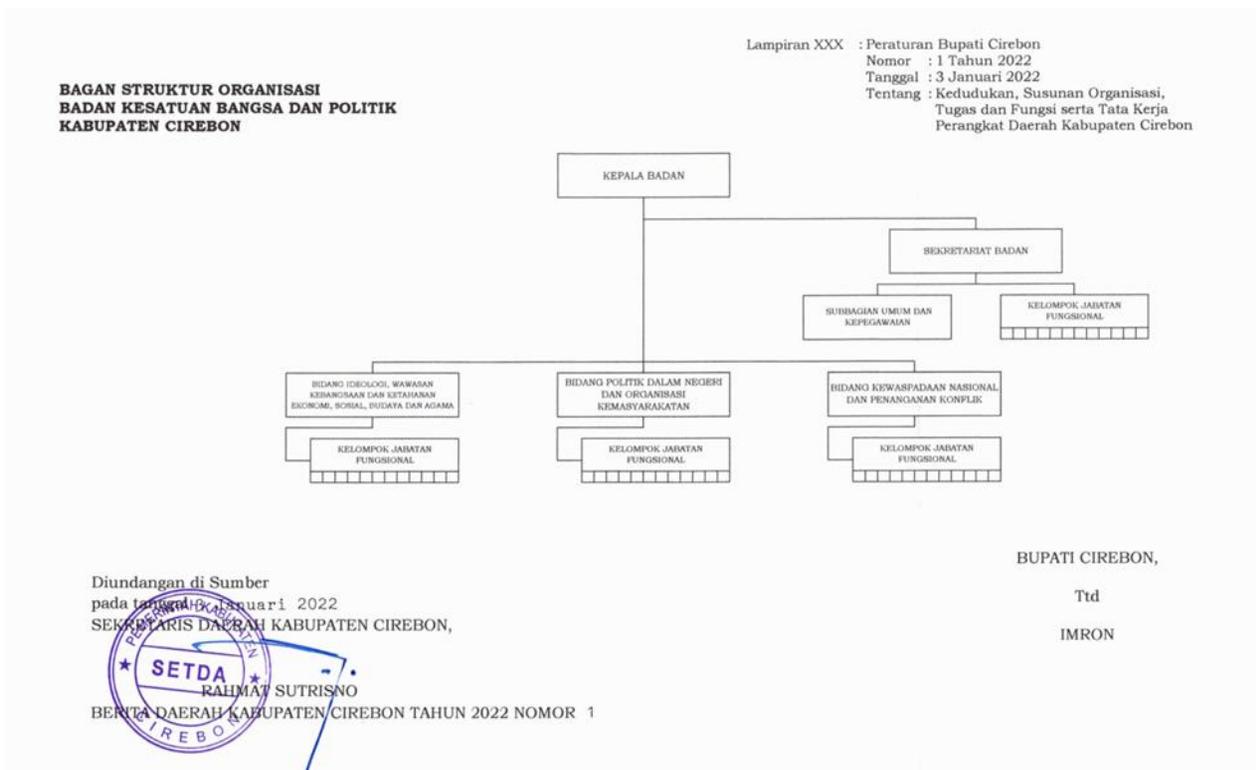
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, bahwa Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Koordinator Keuangan dan Aset;
 - c. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Pengelola Keuangan;
 - e. Bendahara Pengeluaran;
 - f. Pelaksana Akuntansi;
 - g. Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana;
 - h. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama membawahi:
 - a. Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
4. Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan:

- a. Sub Koordinator Politik Dalam Negeri;
 - b. Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan;
5. Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik membawahi :
- a. Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen
 - b. Sub Koordinator Penanganan Konflik

A. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Cirebon



1.2. Fungsi dan Tugas

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, dan hubungan kelembagaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan, merumuskan kebijakan strategis, membina administrasi dan teknis, mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja Badan berdasarkan visi dan misi daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Merumuskan program kerja di lingkungan badan berdasarkan rencana strategis badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- e. Membina bawahan di lingkungan badan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- f. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Merumuskan perencanaan dan pengendalian anggaran serta pengendalian administrasi Badan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
- h. Menetapkan pedoman teknis pengaturan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NPSK) bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik

- (SPP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Mengendalikan dan membina pelaksanaan bina ideologi, wawasan kebangsaan dan politik dalam negeri sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - k. Mengendalikan dan membina pelaksanaan ketahanan bangsa dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - l. Mengendalikan dan membina pelaksanaan ketahanan bangsa dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - m. Mengendalikan dan membina pelaksanaan kewaspadaan nasional sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - o. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana urusan wajib bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri serta sub bidang Pemerintahan Umum, maka dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 tahun 2022 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat disimpulkan menjadi kewenangan yang mencakup :

- a. Mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Merumuskan, menyusun dan menetapkan rencana dan program kerja Kantor sebagai pedoman kerja sesuai kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. Memberikan pelayanan fasilitas, mediasi, konsultasi, koordinasi, dan motivasi secara teknis administrasi dan operasional di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Memberikan ijin/rekomendasi di bidang hubungan lembaga dan politik;
- e. Memberikan informasi dan saran pertimbangan kepada Bupati dalam hal urusan kesatuan bangsa dan politik sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati;

- f. Menyusun, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan tugas Kantor sesuai dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administrasi kepada bupati melalui Sekretaris Daerah;
- g. Menetapkan kebijakan operasional di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama dan masyarakat, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, ketentraman,
- h. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama dan masyarakat, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, ketentraman, ketertiban umum;
- i. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama dan masyarakat, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, ketentraman, ketertiban umum;
- j. Meningkatkan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama dan masyarakat, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, ketentraman, ketertiban umum;
- k. Menyelenggarakan pengembangan budaya kerja aparatur daerah di lingkup kantor;
- l. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Kantor, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

1.3. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Adapun isu strategis tersebut adalah :

- 1) Kesenjangan sosial Politik, Sosial Ekonomi dan Budaya
- 2) Kemajemukan masyarakat dengan latar belakang SARA, etnis, dan kesukuan yang cukup kental sehingga rentan terhadap isu-isu Primordialisme.
- 3) Belum maksimalnya pendidikan politik di masyarakat
- 4) Hasil proses politik (Pemilihan Kepala daerah) masih sering dikomplain oleh kandidat lain.
- 5) Masih sering terjadi perselisihan antar warga terkait pendirian Rumah Ibadah

- 6) Masih banyaknya aliran kepercayaan yang menimbulkan keresahan di masyarakat.
- 7) Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat belum berperan secara maksimal.
- 8) Peran Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemuda dan Tokoh Perempuan belum berperan secara maksimal dalam mencegah dan menyelesaikan konflik.
- 9) Kurangnya pemahaman tentang wawasan Kebangsaan sehingga mengakibatkan lemahnya semangat persatuan dan kesatuan.
- 10) Masyarakat masih rentan terhadap isu-isu yang berpotensi konflik.
- 11) Penyelesaian masalah masih sering diselesaikan dengan jalan unjuk rasa atau demonstrasi yang anarkis.
- 12) Masih maraknya aksi terorisme dan penyebaran paham radikalisme.
- 13) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing sering memanfaatkan LSM lokal dalam pencapaian misinya.
- 14) Konflik wilayah perbatasan dan pertikaian antar warga, antar pemuda dan antar desa.
- 15) Penyalahgunaan narkoba yang semakin banyak.
- 16) Timbul kembali paham aliran komunisme, separatisme, radikalisme, dan terorisme.

Dari beberapa permasalahan yang telah di kemukakan di atas maka dapat di ketahui faktor-faktor yang mendorong munculnya permasalahan tersebut, baik faktor internal maupun eksternal. Secara umum, permasalahan tersebut dapat dirangkum menjadi lima permasalahan utama untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagai berikut :

1. Pada umumnya kemampuan kelembagaan masyarakat termasuk partai politik masih terbatas baik dari segi manajemen maupun kemampuan finansial membiayai aktivitasnya.
2. Jumlah kelembagaan masyarakat termasuk partai politik cukup besar dibanding dengan kemampuan fiskal pemerintah untuk mendukung pembinaannya.
3. Sering terjadi konflik internal yang berimbas pada fasilitasi pemerintah daerah dan dukungan pemikiran lainnya yang seharusnya tidak relevan lagi di era demokrasi.
4. Masih ditemuinya konflik dan kasus kekerasan antar kelompok masyarakat serta perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas etnis dan agama tertentu

5. Belum optimalnya pengintegrasian nilai-nilai kebangsaan dan Bhineka Tunggal Ika (prinsip keberagaman) dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara.

1.4. Keadaan Pegawai

**Tabel
Komposisi Pegawai
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon
Tahun 2023**

No	Unit kerja	PNS	Honorer	Jumlah
1.	Kepala Badan	1	-	1
2.	Sekretaris Badan	1	-	1
3.	Kepala Bidang	3	-	3
4.	Kepala Sub Bag (Sekretariat)	2	-	2
5.	Kepala Sub Bidang	6	-	6
6.	Staf	9	11	22
7.	Arsiparis Ahli Muda	-	-	-
JUMLAH		22	11	33

Komposisi pegawai selain yang tersebut di atas dapat dilihat dari :

a. Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menurut status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel
Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan
Tahun 2023**

No	Status Kepegawaian	Gol / Ruang	Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag/Ka subid	Staf	Fungsional	Total
1.	PNS								
	Pembina Utama Muda	IV/c	1						1
	Pembina Tingkat I	IV/b		1					1
	Pembina	IV/a			2	2			4
	Penata Tingkat I	III/d				5	1		6
	Penata	III/c				1	2		3
	Penata Muda Tingkat I	III/b					2		2
	Penata Muda	III/a					2		2
	Pengatur Tingkat I	II/d					2	-	2
	Pengatur	II/c					1		1
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b					-		-
	Pengatur Muda	II/a					-		-
	Juru Tingkat I	I/d							
	Juru	I/c							
	Juru Muda Tingkat I	I/b							
Juru Muda	I/a								
2.	Honorer						11		11

b. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dapat disebutkan sebagai berikut :

Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan		
No	Status Kepegawaian	
1.	PNS	
	Strata 3 (S-3) berjumlah	: -
	Strata 2 (S-2) berjumlah	: 7
	Strata 1 (S-1) berjumlah	: 11
	Diploma IV berjumlah	: -
	Diploma III berjumlah	: -
	Diploma II berjumlah	: -
	Diploma I berjumlah	: -
	SMA/Sederajat berjumlah	: 4
	SMP/Sederajat berjumlah	: -
	SD/Sederajat berjumlah	: -
2.	Honorer	
	Strata 2 (S-2) berjumlah	: -
	Strata 1 (S-1) berjumlah	: 7
	Diploma IV berjumlah	: -
	Diploma III berjumlah	: -
	Diploma II berjumlah	: -
	Diploma I berjumlah	: 1
	SMA/Sederajat berjumlah	: 3
	SMP/Sederajat berjumlah	: -
	SD/Sederajat berjumlah	: -

Gambaran secara lengkap tentang pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan Tabel pada halaman berikut :

Tabel
Jumlah Pegawai Menurut Status, dan Tingkat Pendidikan
Tahun 2023

No	Status Kepegawaian	Kepala Badan	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Program dan Keuangan	Kepala Bidang	Kasubbid	Staf	Fungsional	Total
1.	PNS									
	Strata 3 (S-3)									
	Strata 2 (S-2)	1	1	-	-	1	3	1	-	7
	Strata 1 (S-1)	-	-	1	1	2	3	4	-	11
	Diploma IV									
	Diploma III									
	Diploma II									
	Diploma I									
	SMA / Sederajat					-		4		4
	SMP / Sederajat									
	SD / Sederajat									
2.	Honorer									
	Strata 3 (S-3)									
	Strata 2 (S-2)									
	Strata 1 (S-1)					-		7		7
	Diploma IV									
	Diploma III									
	Diploma II									
	Diploma I							1		1
	SMA / Sederajat					-		3		3
	SMP / Sederajat									
	SD / Sederajat					-		-		-
TOTAL		1	1	1	1	3	6	20	-	33

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022, antara lain :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
12. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
13. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan/Kantor Daerah Kabupaten Cirebon;
14. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon

1.5. Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon didukung oleh sarana dan prasarana yang terdiri dari :

Tabel : DAFTAR SARANA DAN PRASARANA SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023

NO URUT	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1	GEDUNG KANTOR	1	Jl. Sunan Muria No 14 Sumber
2	PERALATAN DAN MESIN		
	SUZUKI/GC415V APV DLX MT	1	
	Suzuki/ST 150 Futura	1	2001
	TOYOTA / RUSH 1.5S	1	2015
	Honda WIN	1	2003
	Honda Supra	1	2003
	Honda WIN	1	2003
	Honda Supra	1	2003
	Honda Revo	9	2010
	Honda Revo	2	2017
	Mesin Tik	1	
	Filling Kabinet	2	2005
	Filling Kabinet	3	2006
	Komputer PC	1	
	Kursi Putar	1	
	Lemari Besi	1	
	Filling Kabinet	2	
	Teko Listrik	2	
	Tabung Pemadam Kebakaran	1	
	Mobil Pick Up	1	2006
	AC Split	1	Daikin 2 pk
	Meja Tulis	5	2006
	Meja Tulis	10	2006
	Meja Rapat	2	
	Lemari Besi	2	
	Rak Besi	1	2006
	Lemari Arsip	1	
	Lemari Arsip / Dinamis	1	
	Buffet Kayu	1	
	Printer	1	
	Dispenser	3	2007
	Kompur Gas	1	
	Tabung Gas	1	
	AC Split	1	Panasonic
	Printer	1	
	Kipas Angin	2	

AC Split	3	Sharp
Komputer PC	3	
Televisi	2	Sharp 21"
Lemari Besi	2	
Rak Piring	1	2009
Lemari Kayu	1	2 pintu
Komputer PC	1	
AC Split	1	Samsung ½ pk
Almari Besi	2	2010
Masin Tik	1	2010
Meja Kerja	1	1 biro, 3 laci, 1 lemari
Meja Kerja	4	1 biro, 2 laci, 1 lemari
Meja Kerja	9	½ biro, 1 laci, 1 lemari
Kursi Sofa	3	Set, 2+1+meja
Kursi Sofa	1	Set, 2+2+meja
Kursi Sofa	1	Set, 3+2+1+meja
Kursi Kerja / Putar	1	Ichiko
Kursi Kerja / Putar	4	
Notebook	4	Toshiba
Printer	2	
Modem Internet & Instalasi Jaringan	1	
Handycam	1	Sony 2010
Portable Wireless	1	TOA
Dispenser	3	Miyako
Printer	3	
Printer	4	
Komputer PC	1	LG 2011
Monitor LCD	2	
Monitor LCD	4	
Komputer PC	4	2012
Komputer PC	1	Simbada
Laptop / notebook	1	
Printer	3	
Komputer PC	2	Votre
Printer	2	2018+2017
Komputer PC	1	LG
Lemari Arsip sliding	2	2012
Komputer PC	1	Asus
Alat Pemotong Kertas	1	2013
Mesin Penghancur Kertas	3	2013 (1) + 2014 (2)
Mesin Absensi	3	2013 (1) + 2014 (2)
Tabung Pemadam Kebakaran	4	2009 + 2013
Laptop	2	HP
Mesin pemotong rumput	1	Honda
Lemari arsip pintu sorong kaca	2	2013
Meja kerja	10	140x70x75cm – 2014
Lemari arsip pintu ayun	1	
Filling Kabinet	2	2013
Sofa	2	2+2+1+meja
Vacum Cleaner	1	Bosch

Laptop	2	Toshiba
Peralatan Komputer & Jaringan	1	
Kanopi Parkir Mobil/Motor	1	
Laptop	1	Asus
Filling Kabinet	5	2014
Meja Rapat Pimpinan	1	
Kursi Kerja/Putar	25	
Finger Print	1	2014 Hibah BKPSDM
Kursi Rapat (Kursi Lipat)	100	
Brankas	2	2013
Kursi Sofa Tamu	1	2+2+1+meja
Peralatan Dapur	1	
Papan Tulis White Board	1	2016
Wireless	1	
Layar Film	1	
Radio UHF - VHF Stationary	1	
Radio HF/FM Stationary	1	
Faximile		
Pesawat Telepon	5	2016
AC Split	1	Panasonic 2 pk
Radio VHF RIG	3	2009
AC Split	4	Panasonic 1 pk
Handy Talkie (HT)	7	2009
Mega Phone	1	2005
Pesawat Handy Talkie (HT)	5	
Pesawat Telepon	1	
Pesawat RIG	3	2006
Power Suplly	1	
Tower VHF	1	
Komputer Papilion	1	
LCD Proyektor	1	
Meja Kerja	20	½ biro 2015
Kursi Kerja Putar	16	Brother
Kursi Rapat	20	Brother
Meja Rapat	5	Expo
Kursi Sofa Tamu	3	2+2+1+meja
Televisi	1	Samsung 40"
Televisi	2	Samsung 32"
Kompore Gas	1	Rinnai 2 tungku
Dispenser	4	Miyako
Rak Piring	1	
Kursi Tunggu	3	4 kursi
Handycam	1	Sony
Sound System	1	
Standar Mix	2	
AC Split	2	Sharp ½ pk
AC Split	1	Grue ½ pk
Lemari Buku	1	Super Furniture
Infocus	1	Canon
Portable Wireles	1	TOA

Camera	1	Canon
Alat Penghancur Kertas	1	AURORA/HSM Shredder S10, Paper shreder haevy duty ,8 Sheets (2023)
Kalkulator	40	
Kursi Tunggu	3	Pegasus 4 Kursi (2023)
AC Split	1	Sharp / 1 PK (2023)
PC Unit	1	Simbada monitor LG Prosesor : 11th gen Intel(R)Core(TM) i7-11700@2.50Ghz(16CpUs) Memory : 8192MB RAM (2023)
Meja Rapat	1	MODERA Furniture110 Cm X 210 Cm (2023)
Rak Besi	2	Brother/4 Sap (2023)
Lemari Es	2	Sharp (2023)
Lemari Besi/Metal	1	Brother 2 Pintu Sorong (2023)
AC. LG	1	Sharp 1/2 pk (2023)
Lap Top	1	LENOVO LAP TOP-N8V2F5EO Prosesor :AMD Ryzen 5 7520U With Radeon Graphics,Memory 8192MB RAM,64-bit (2023)
Lap Top	1	LENOVO LAPTOP-779JEBBR Prosesor : AMD Ryzen 5 7520U With Radeon Graphics,Memory 8192MB RAM,64-bit (2023)
AC. LG	1	LG 1/2 pk (2023)
Scanner	1	Brother/Model DS-640 (2023)
Lap Top	3	'Lenovo Processor 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz RAM 8,00 GB (7,80 GB usable)64-bit operating system (2023)
PC.Unit	2	Dell DESKTOP-SNQJEKE Prosesor Intel®Core™i3-6100T CPU @ 3.20GHz Ram 8.00 GB 64-bit operating system

			(2023)
	Printer	1	Epson L3210
	Kursi Rapat	5	Chitose
	Kursi Putar	3	Brother
	Sofa	1	Informa/Neo Snowville Relax Sofa Blk Moocha-35-23 (188*24*114CM)
	Meja Kerja 1/2 Biro	2	MODERA Furniture (2023)
3	GEDUNG DAN BANGUNAN		
	Gedung Kantor	1	
4	JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN		
	Jaringan Telepon PABX	1	
	Jaringan Telepon PABX	1	
5	ASET TETAP LAINNYA		
	<i>N i h i l</i>		
6	KONTRUKSI DALAM Pengerjaan		
	<i>N i h i l</i>		

1.6. Keuangan

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2023 sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003.

KODE REK.	URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN				
5.	BELANJA DAERAH	51.145.561.802,00	50.495.133.611,00	650.428.191,00	98,73%
5.1.	BELANJA OPERASI	50.803.008.802,00	50.152.917.611,00	650.091.191,00	98,72%
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	4.328.188.300,00	4.050.263.723,00	277.924.577,00	92,43%
	BELANJA BARANG DAN JASA	5.926.720.502,00	5.621.578.888,00	305.141.614,00	94,85%
	BELANJA HIBAH	40.494.100.000,00	40.481.075.000,00	13.025.000,00	99,97%
5.2.	BELANJA MODAL	342.553.000,00	342.216.000,00	337.000,00	99,90 %
5.2.1.	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	157.553.000,00	157.516.000,00	37.000,00	99,98%
5.2.2.	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	185.000.000,00	184.700.000,00	300.000,00	99,84%
5.2.3.	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	0,00	0,00	0	0%
	JUMLAH BELANJA	51.145.561.802,00	50.495.133.611,00	650.428.191,00	98,73%
	SURPLUS / (DEFISIT)	(51.145.561.802,00)	(50.495.133.611,00)	(650.428.191,00)	98,73%

Dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran tersebut, berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2023. Realisasi dana pada anggaran tersebut tercapai 98,73%.

Tahun 2023 secara keseluruhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan Anggaran sebesar Rp.51.145.561.802,- dan terealisasi sebesar Rp.50.495.133.611 sisa sebesar Rp.650.428.191,- atau tercapai sebesar 98,73%. Dengan pelaksanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) dan Urusan Pemerintahan Umum). Pelaksanaan urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) pada Tahun 2023 dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, 6 (enam) kegiatan, 22 (dua puluh dua) sub kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.5.541.084.602,- dan terealisasi sebesar Rp.5.116.798.963,- sisa sebesar Rp.424.285.639,- atau tercapai sebesar 92,34%.

Sementara Urusan Pemerintahan Umum pada Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan melalui 5 (lima) Program, 5 (Lima) Kegiatan dan 19 (Sembilan Belas) Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.45.604.477.200,- dan terealisasi sebesar Rp.45.378.334.648,- sisa pagu Rp.226.142.552,- atau tercapai sebesar 99,50%.

1.7 . Sistematika LKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun berdasarkan deskripsi mengenai pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon selama tahun 2023. Capaian kinerja (*performance result*) 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi, analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah kesenjangan kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang dengan pola pikir seperti itu.

Adapun Sistematika Penyajian adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan struktur organisasi
- Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa Politik untuk periode 2019 - 2024 dan Penetapan Kinerja untuk tahun 2023
- Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta analisis pencapaian kinerja

dikaitkan dengan pertanggung jawaban manajerial terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2023

Bab IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

a. Visi dan Misi Kepala Daerah

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem dan kebijakan bidang aparatur negara termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri serta Perlindungan Masyarakat yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 - 2024, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan rencana strategis Tahun 2019 - 2024 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2019 - 2024.

2.1.1. Visi

Mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu : ***“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman “***, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik membangun kelanjutan dan kesinambungan Visinya yaitu :

“Meningkatnya masyarakat Kabupaten Cirebon yang agamis, demokratis, partisipatif, harmonis, tertib, aman, tenteram, berkeadilan dan beradab dalam kerangka persatuan dan kesatuan yang berlandaskan Pancasila”.

2.1.2. Misi

Misi adalah upaya-upaya yang didasari kemauan kuat dari suatu lembaga/organisasi dengan memperlihatkan kewenangan dan tanggung jawabnya atas kepentingan umum (Publik) guna mewujudkan kondisi dan situasi yang diinginkan pada akhir kurun waktu tertentu yang menyiratkan tujuan-tujuan yang harus dicapai sebagai persyaratan terwujudnya Visi.

Misi

1. Kabupaten Cirebon BERBUDAYA :
Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.
2. Kabupaten Cirebon SEJAHTERA :
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.
3. Kabupaten Cirebon AGAMIS :
Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika.
4. Kabupaten Cirebon MAJU
Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.
5. Kabupaten Cirebon AMAN :
Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Adapun Misi yang menjadi langkah kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Cirebon adalah pada *Misi Ketiga dan kelima* yaitu sebagai berikut :

Penjelasan Misi Ketiga : *Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika*

Penjelasan Misi Kelima : *Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.*

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya dengan formula yang disesuaikan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) *Meningkatkan kondusifitas masyarakat yang berwawasan kebangsaan Politik;*

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya dengan formula yang disesuaikan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pelayanan prima Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Terciptanya manusia Kabupaten Cirebon yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air/berwawasan kebangsaan, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin;
- c. Terwujudnya pelaksanaan pengembangan demokratisasi sesuai norma, etika dan budaya yang berpancasila.

b. Sasaran

1. Menurunnya pergesekan (fiksi) antar dan internal umat beragama;
2. Menurunnya konflik sosial;
3. Menurunnya kegiatan yang bertentangan dengan norma agama, sosial dan adat;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

c. Kebijakan

- 1) Fasilitasi komunikasi forum forum antar umat beragama;
- 2) Peningkatan pembinaan terhadap kelompok sosial kemasyarakatan.
- 3) Penguatan lembaga sosial, agama dan adat;
- 4) Peningkatan Pengetahuan dan pemahaman wawasan kebangsaan dan cinta tanah air yang beretika dan bermoral Pancasila;
- 5) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran etika dan budaya demokratisasi masyarakat yang Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pemberdayaan lembaga pemerintahan, partai politik, organisasi kemasyarakatan dan LSM.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD

a. Pengertian Indikator Kinerja

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Setiap program dan kegiatan dalam Renstra kemudian dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakteristik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan nantinya dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/program/kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan.

b. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja instansi yang bersangkutan yaitu :

1. Spesifik;
2. Dapat dicapai;
3. Relevan;
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
5. Dapat dikuantifikasi dan diukur.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
4. Kebutuhan data statistik pemerintah;
5. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN CIREBON

1. Unit : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Organisasi
2. Tugas : Penyusunan dan Penyelenggaraan
Pokok Kebijakan Daerah di Bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik
3. Fungsi : a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang

- Kesatuan Bangsa dan Politik
- b. Masyarakat;
Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - c. di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketahanan bangsa,
 - d. Pengembangan demokrasi, dan
 - e. Hubungan Lembaga;
Pelaksanaan pelayanan teknis
 - f. ketatausahaan kantor;
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sasaran Strategis Renstra :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Indikator Kinerja Utama	Sumber Data (Internal & Eksternal)
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana dan kapasitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran yang telah direalisasikan dibagi jumlah administrasi perkantoran yang menjadi target dikali 100%	Kesbangpol
		Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana yang telah direalisasikan dibagi Jumlah sarana dan prasarana yang menjadi target dikali 100%	Kesbangpol
		Terwujudnya peningkatan disiplin pakaian aparatur	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya yang terealisasi dibagi Jumlah target pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya dikali 100%	Kesbangpol
		Terwujudnya Peningkatan Sistem	Tepat waktu dalam penyampaian laporan kinerja,	Kesbangpol

		Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	semesteran dan tahunan SKPD	
		Terlaksananya pengembangan sistem perencanaan sectoral	Tepat waktu dalam penyampaian dokumen perencanaan SKPD	Kesbangpol
2.	Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama	Prosentase Penyelesaian Friksi/Gesekan antar Umat Beragama	Jumlah konflik SARA yang terjadi di wilayah Kabupaten Cirebon	Kesbangpol
3.	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial	Prosentase Penyelesaian Konflik sosial	Perbandingan jumlah konflik sosial, demo dan kerusuhan pada kondisi awal dengan jumlah konflik sosial, demo dan kerusuhan pada tahun berikutnya Perbandingan organisasi politik dan kemasyarakatan yang aktif dengan total organisasi politik dan kemasyarakatan yang ada di kabupaten Cirebon	Kesbangpol
4.	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	Penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	Tingkat partisipasi : perbandingan jumlah pemilih dengan jumlah hak pilih	Kesbangpol

2.1.4. Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Mengacu pada Indikator diatas maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 adalah :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Pada Tahun 2023 Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan berusaha memaksimalkan kegiatan tetap fokus kepada makna dan nilai-nilai Pancasila harus tetap di amalkan dalam kehidupan kita, agar keberadaannya tidak hanya dijadikan sebagai simbol semata. Pancasila dalam sejarah perumusannya melalui proses yang sangat panjang oleh para pendiri negara ini. Pancasila diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi kehidupan manusia, baik itu dalam lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam berperilaku dan bersosialisasi antar sesama manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus dilandasi oleh Pancasila yang dijadikan landasan dalam berperilaku. Wawasan Kebangsaan harus menjadi bagian yang terintegrasi bukan hanya sepihak pemerintah daerah tetapi sebuah tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Demi mewujudkan hal tersebut maka di Tahun 2023 beberapa kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

- Kegiatan Pembinaan/Sosialisasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, di kalangan masyarakat dan mahasiswa di Kabupaten Cirebon
- Penguatan Ideologi Pancasila dan Kesadaran Bela Negara
Dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	- Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	86 % (4 Kegiatan)

		<p>Sejarah Kebangsaan yang Disusun</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan, Sejarah Kebangsaan - Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan - Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan, Sejarah Kebangsaan 	
--	--	---	--

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Pada Tahun 2023 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik di selenggarakan direncanakan dua kegiatan dalam rangka meningkatkan pendidikan politik masyarakat. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya partisipasi partai politik dan meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat. Dengan kegiatan yaitu sebagai berikut :

- Sosialisasi Perundang-undangan Bidang Politik kepada Pemilih Pemula
- Sosialisasi Perundang-undangan Bidang Politik kepada Masyarakat
- Sosialisasi Penguatan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula
- Sosialisasi Penguatan Pendidikan Politik bagi masyarakat
- Sosialisasi penyelesaian Perselisihan Akibat Politik
- Bimtek Bendahara dan Pengurus Partai Politik
- Bimbingan Teknis Tim Pemantauan Perkembangan Politik di daerah
- Bimtek Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Serentak
- Bantuan Hibah Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kab. Cirebon
- Bantuan Hibah Pilkada tahun 2024

Dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	- Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	86 % (3 Kegiatan)

		<p>Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah - Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, 	
--	--	---	--

		Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
--	--	---	--

3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Pada Tahun 2023 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di selenggarakan melalui tiga kegiatan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Cirebon. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Cirebon. Dengan kegiatan yaitu sebagai berikut :

- Pengembangan Program-program Organisasi Kemasyarakatan/LSM -
Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan/ LSM
- Sosialisasi Perundang-undangan Bidang Organisasi Kemasyarakatan/LSM
- Ekspose bagi Ormas/ LSM
- Jambore Ormas/LSM
- Pendataan Ormas/LSM
- Monitoring dan Evaluasi Keberadaan Ormas/LSM
- Bantuan Hibah Kepada Ormas/LSM

Dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun - Jumlah Orang yang 	87 % (3 Kegiatan)

		<p>Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas, Asing di Daerah</p> <p>- Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas, Asing di Daerah</p>	
--	--	---	--

4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Pada Tahun 2023 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya di selenggarakan melalui empat kegiatan dalam rangka meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kabupaten Cirebon

Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kabupaten Cirebon Dengan kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, Meliputi :
 - Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Moderasi Beragama
 - Kegiatan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pemuda Pengerak Kerukunan Umat Beragama
 - Kegiatan Mewujudkan Tempat Ibadah Sebagai Sarana Pelapor Moderasi Beragama
2. Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, meliputi :
 - Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba
3. Fasilitasi Penghayat Aliran Kepercayaan di Daerah, meliputi :
 - Pembinaan dan Pengawasan Aliran Kepercayaan

Dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun - Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di, Daerah - Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah - Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan 	87 % (4 Kegiatan)

		Penyalagunaan Narkotika, Kerukunan Beragama Penghayat di Daerah	Fasilitasi Umat dan Kepercayaan
--	--	---	---------------------------------

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Pada Tahun 2023 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial di selenggarakan melalui lima Sub kegiatan dalam rangka meningkatkan Ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Cirebon.

Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Cirebon Dengan kegiatan yaitu sebagai berikut :

- Rapat Koordinasi Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Rapat Pokja Tim Koordinasi Penanggulangan Terorisme, Radikalisme dan Separatisme, Rapat Koordinasi Tim Monitoring Pengawasan Orang/Lembaga/Tenaga Kerja Asing, Rakor Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (Wasdin Pemda)
- Sosialisasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) , Sinergitas antara Pemerintah Daerah TNI-Polri dan Pemdes, Rakor Tim Penanganan Konflik Sosial
- Monev Penanganan Konflik Sosial, Orang Asing, Pekerja Asing, dan Peneliti Asing.

Dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama	- Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar	82 % (5 Kegiatan)

		<p>Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah - Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah - Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang 	
--	--	---	--

		Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah - Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	
--	--	---	--

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya.

Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Perjanjian Kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berkenaan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2023 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada, eselon II, III, sampai dengan eselon IV.

Selanjutnya tabel Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 dan perubahannya disajikan sebagaimana pada lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 ini (Perjanjian Kinerja Terlampir).

2.3. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

a. Target Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = (4 - 3)	6
	PENDAPATAN	-	-	0,00	0,00
5.	BELANJA DAERAH	16.678.661.002,00	51.145.561.802,00	34.466.900.800,00	206,65
5.1.	BELANJA OPERASI	16.418.067.002,00	50.803.008.802,00	34.384.941.800,00	209,43
5.1.01.	Belanja Pegawai	4.154.183.300,00	4.382.188.300,00	228.005.000,00	5,49
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.519.783.702,00	5.926.720.502,00	406.936.800,00	7,37
5.1.05.	Belanja Hibah	6.744.100.000,00	40.494.100.000,00	33.750.000.000,00	500,44
5.2.	BELANJA MODAL	260.594.000,00	342.553.000,00	81.959.000,00	31,45
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.594.000,00	157.553.000,00	81.959.000,00	108,42
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	16.678.661.002,00	51.145.561.802,00	0,00	0,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.678.661.002,00)	(51.145.561.802,00)	(34.466.900.800,00)	206,65
	PEMBIAYAAN NETO	-	-	0,00	0,00

b. Alokasi Anggaran Per sasaran Strategis

Pada Tahun 2023 Alokasi Anggaran Per sasaran strategis Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah sebagai berikut :

No	Kode	Sasaran Kinerja Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Kinerja		Rasio (%)	Ket.
				Bulan ini	s/d Bulan ini		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1.1.01.	Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama	3.684.456.600	704.760.600	3.681.307.900	99.91	
		(IKK/IKU)-Prosentase Penyelesaian Friksi/Gesekan antar Umat Beragama (Non Kumulatif)	82 prosen	82.000	82.000	100	
2	1.1.02.	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial	2.682.597.700	82.952.076	2.472.377.248	92.16	
		(IKK/IKU)-Prosentase Penyelesaian Konflik sosial (Non Kumulatif)	87 prosen	87.000	87.000	100	
3	1.1.03.	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	39.237.422.900	32.230.897.000	39.224.649.500	99.97	
		(IKK/IKU)-Penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat (Non Kumulatif)	86 Prosen	86.000	86.000	100	
4	1.1.04.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	5.541.084.602	377.519.909	5.116.798.963	92.34	
		(IKK/IKU)-Indeks kepuasan masyarakat (Non Kumulatif)	85 Poin	85.000	85.000	100	

2.4. Instrumen Pendukung









BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik telah melakukan beberapa Program/Kegiatan yang secara keseluruhan dapat terlaksana dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Lebih kepada pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, Pembinaan, Koordinasi serta Monitoring. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon selaku pengemban sebagian tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Cirebon melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan dimaksud memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2023.

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Indikator sasaran adalah suatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan tersebut.

Media pengukuran kinerja terdiri dari :

- Formulir PK (Pengukuran Kinerja)

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari nilai-nilai tersebut, yaitu :

- 100 = target tercapai
- < 100 = target tidak tercapai

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Penjabaran evaluasi kinerja dari setiap sasaran kinerja di tahun 2023 serta perbandingan dari kinerja tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana dan kapasitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana dan kapasitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah	- Indeks kepuasan masyarakat	80% (1 SKPD)	80% (1 SKPD)	100% (1 SKPD)	85 %	92,33 %	108,62 %

2. Meningkatnya penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun - Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan, Sejarah Kebangsaan - Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan - Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan, Sejarah Kebangsaan 	84% (2 Kegiatan)	99,65% (2 Kegiatan)	118,63% (2 Kegiatan)	86% (4 Kegiatan)	99,28 (4 Kegiatan)	115,44% (4 Kegiatan)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun - Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah - Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 	84% (3Kegiatan)	94,05% (3 Kegiatan)	111,96% (3 Kegiatan)	86% (3 Kegiatan)	99,98 % (3 Kegiatan)	116,25% (3 Kegiatan)

3. Meningkatnya Penyelesaian Konflik Sosial

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun - Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas, Asing di Daerah - Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas, Asing di Daerah 	85% (3 Kegiatan)	95,5% (3 Kegiatan)	112,35% (3 Kegiatan)	87 % (3 Kegiatan)	97,32% (3 Kegiatan)	111,86% (3 Kegiatan)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun - Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di, Daerah - Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah - Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di, Daerah 	85 % (4 Kegiatan)	95,88% (4 Kegiatan)	112,8% (4 Kegiatan)	87% (4 Kegiatan)	87,56 % (4 Kegiatan)	100,64 % (4 Kegiatan)

4. Pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun - Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah - Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah - Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan 	81% (5 Kegiatan)	81% (5 Kegiatan)	100% (5 Kegiatan)	82 % (5 Kegiatan)	79,43% (5 Kegiatan)	96,86% (5 Kegiatan)

		<p>Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Rincian Kinerja

Berdasarkan kinerja yang telah dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Pada Tahun 2023 telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab sebanyak 4 (empat) sasaran yang ditetapkan, dan berhasil dicapai :

No.	Sasaran Strategis	Pencapaian		
		Tercapai	Belum Tercapai	Tidak Tercapai
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan public	√		
2.	Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama	√		
3.	Meningkatnya penyelesaian konflik social	√		
4.	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	√		

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada tahun 2023 Program kegiatan yang berjalan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A. Maksud dan tujuan :

Pelayanan administrasi perkantoran bertujuan untuk mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang baik

B. Sasaran :

Sasaran program pelayanan administrasi perkantoran adalah kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor.

Adapun Realisasi Kegiatan dapat di jabarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	85	85	100

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Pada Tahun 2023 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan memiliki kegiatan yaitu sebagai berikut :

- Kegiatan Pembinaan/Sosialisasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, di kalangan masyarakat dan mahasiswa di Kabupaten Cirebon
- Penguatan Ideologi Pancasila dan Kesadaran Bela Negara

Adapun Realisasi Kegiatan dapat di jabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	- Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun - Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan	86 % (4 Kegiatan)	100	116,27
				100	116,27

		<p>Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan, Sejarah Kebangsaan</p> <p>- Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</p>		100	116,27
		<p>- Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan, Sejarah Kebangsaan</p>		100	116,27

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Pada Tahun 2023 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik di laksanakan Tiga Sub kegiatan dalam rangka meningkatkan pendidikan politik masyarakat.

Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya partisipasi partai politik dan meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat. Pendidikan Politik sebagai sarana pembinaan kepada masyarakat dalam menumbuhkan dan menciptakan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara. Mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan, Dengan beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut :

- Sosialisasi Perundang-undangan Bidang Politik kepada Pemilih Pemula
- Sosialisasi Perundang-undangan Bidang Politik kepada Masyarakat
- Sosialisasi Penguatan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula
- Sosialisasi Penguatan Pendidikan Politik bagi masyarakat
- Sosialisasi penyelesaian Perselisihan Akibat Politik
- Bimtek Bendahara dan Pengurus Partai Politik
- Bimbingan Teknis Tim Pemantauan Perkembangan Politik di daerah
- Bimtek Tim Pengawas Pemilihan Kuwu Serentak
- Bantuan Hibah Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kab. Cirebon
- Bantuan Hibah Pilkada tahun 2024

Adapun Realisasi Kegiatan dapat di jabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	- Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	86 % (3 Kegiatan)	100	116,27

		<p>Situasi Politik di Daerah yang Disusun</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 		100	116,27
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 		100	116,27

Adapun penyelenggaraan kegiatan ini guna Mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan pendidikan politik dengan nilai kebangsaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara, berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan menjunjung tinggi NKRI.

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Pada Tahun 2023 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di selenggarakan melalui Tiga Sub kegiatan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Cirebon. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Cirebon.

Pengembangan program-program dalam Ormas/LSM yang didalamnya mencakup pengembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menjaga keutuhan NKRI, Adanya kebijakan yang mengatur tentang Ormas yang terangkum didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dengan melalui Beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut :

- Pengembangan Program-program Organisasi Kemasyarakatan/LSM - Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan/ LSM
- Sosialisasi Perundang-undangan Bidang Organisasi Kemasyarakatan/LSM
- Ekspose bagi Ormas/ LSM
- Jambore Ormas/LSM
- Pendataan Ormas/LSM
- Monitoring dan Evaluasi Keberadaan Ormas/LSM
- Bantuan Hibah Kepada Ormas/LSM

Adapun Realisasi Kegiatan dapat di jabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial	- Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan	87 % (3 Kegiatan)	100	114,94

		Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun			
		- Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas, Asing di Daerah		100	114,94
		- Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas, Asing di Daerah		100	114,94

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Pada Tahun 2023 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya di selenggarakan melalui 4(Empat) kegiatan dalam rangka meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kabupaten Cirebon.

Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kabupaten Cirebon Dengan kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, Meliputi :
 - Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Moderasi Beragama
 - Kegiatan Penguatan Moderasi Beragama bagi Pemuda Pengerak Kerukunan Umat Beragama
 - Kegiatan Mewujudkan Tempat Ibadah Sebagai Sarana Pelapor Moderasi Beragama
2. Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, meliputi :
 - Sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba
3. Fasilitasi Penghayat Aliran Kepercayaan di Daerah, meliputi :
 - Pembinaan dan Pengawasan Aliran Kepercayaan

Adapun Realisasi Kegiatan dapat di jabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 5.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial	- Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	87 % (4Kegiatan)	100	114,94
		- Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di,		86,60	99,54

		<p>Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 		100	114,94
		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 		100	114,94

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Pada Tahun 2023 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial di selenggarakan melalui lima Sub kegiatan dalam rangka meningkatkan Ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Cirebon.

Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Cirebon Dengan kegiatan yaitu sebagai berikut :

- Rapat Koordinasi Tim Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Rapat Pokja Tim Koordinasi Penanggulangan Terorisme, Radikalisme dan Separatisme, Rapat Koordinasi Tim Monitoring Pengawasan Orang/Lembaga/Tenaga Kerja Asing, Rakor Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (Wasdin Pemda)
- Sosialisasi FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) , Sinergitas antara Pemerintah Daerah TNI-Polri dan Pempdes, Rakor Tim Penanganan Konflik Sosial
- Monev Penanganan Konflik Sosial, Orang Asing, Pekerja Asing, dan Peneliti Asing.

Adapun Realisasi Kegiatan dapat di jabarkan dalam tabel berikut :

Tabel.6

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama	- Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	82 % (5 Kegiatan)	100	121,95

		<p>- Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	100	121,95
		<p>- Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	100	121,95
		<p>- Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang</p>	100	121,95

		<p>Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p> <p>- Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</p>		100	121,95
--	--	--	--	-----	--------

3.4. Realisasi Anggaran

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan di Tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

KODE REK	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
	Belanja Daerah	51.145.561.802,-	50.495.133.611,-	650.428.191,-	98,73%
	BELANJA NON URUSAN	5.541.084.602	5.116.798.963	424.285.639	92,34
00.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.541.084.602	5.116.798.963	424.285.639	92,34
00.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.812.500	111.341.078	6.471.422	94,51
00.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	73.383.700	67.395.606	5.988.094	91,84
00.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44.428.800	43.945.472	483.328	98,91
00.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.395.355.500	4.063.400.923	331.954.577	92,45
00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.382.188.300	4.050.263.723	331.924.577	92,43
00.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.823.200	6.823.200	0	100,00
00.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.344.000	6.314.000	30.000	99,53
00.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.205.800	21.205.800	0	100,00
00.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21.205.800	21.205.800	0	100,00
00.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	460.139.400	459.580.865	558.535	99,88
00.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.026.800	9.026.800	0	100,00
00.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.756.200	123.719.200	37.000	99,97
00.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.717.200	2.717.200	0	100,00
00.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.021.800	26.708.100	313.700	98,84
00.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.100.000	19.100.000	0	100,00
00.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	141.416.100	141.339.700	76.400	99,95
00.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	13.095.000	13.095.000	0	100,00
00.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.006.300	123.874.865	131.435	99,89
00.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	233.905.000	233.605.000	300.000	99,87
00.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	33.905.000	33.905.000	0	100,00
00.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000	199.700.000	300.000	99,85
00.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.827.152	74.244.253	25.582.899	74,37

00.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.817.152	56.234.253	25.582.899	68,73
00.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.010.000	18.010.000	0	100,00
00.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.839.250	153.421.044	59.418.206	72,08
00.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	111.395.750	79.345.100	32.050.650	71,23
00.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.817.500	8.648.600	26.168.900	24,84
00.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	2.045.000	2.045.000	0	100,00
00.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64.581.000	63.382.344	1.198.656	98,14
	BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	45.604.477.200	45.378.334.648	226.142.552	99,50
01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.026.264.300	1.019.120.900	7.143.400	99,30
01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.026.264.300	1.019.120.900	7.143.400	99,30
01.02.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	37.546.000	37.546.000	0	100,00
01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	901.492.800	896.394.300	5.098.500	99,43
01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	55.255.600	55.255.600	0	100,00
01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	31.969.900	29.925.000	2.044.900	93,60
01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	38.211.158.600	38.205.528.600	5.630.000	99,99
01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pementapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	38.211.158.600	38.205.528.600	5.630.000	99,99
01.03.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	129.350.100	126.911.300	2.438.800	98,11

01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	96.328.300	96.328.300	0	100,00
01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	37.985.480.200	37.982.289.000	3.191.200	99,99

01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.268.414.200	1.234.281.800	34.132.400	97,31
01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.268.414.200	1.234.281.800	34.132.400	97,31
01.04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	160.952.500	155.841.500	5.111.000	96,82
01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	888.662.000	872.004.000	16.658.000	98,13
01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	218.799.700	206.436.300	12.363.400	94,35
01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.414.183.500	1.238.095.448	176.088.052	87,55
01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	1.414.183.500	1.238.095.448	176.088.052	87,55
01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	36.841.000	36.841.000	0	100,00
01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.290.733.200	1.118.417.608	172.315.592	86,65
01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	56.619.400	53.672.364	2.947.036	94,80
01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	29.989.900	29.164.476	825.424	97,25

01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	3.684.456.600	3.681.307.900	3.148.700	99,91
01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	3.684.456.600	3.681.307.900	3.148.700	99,91
01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	95.490.900	95.490.900	0	100,00
01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	128.208.300	128.190.300	18.000	99,99
01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	120.380.000	120.356.000	24.000	99,98
01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	69.866.000	69.791.000	75.000	99,89
01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	3.270.511.400	3.267.479.700	3.031.700	99,91

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2023 sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003.

KODE REK.	URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN					
5.	BELANJA DAERAH	51.145.561.802,00	50.495.133.611,00	650.428.191,00	98,73%
5.1.	BELANJA OPERASI	50.803.008.802,00	50.152.917.611,00	650.091.191,00	98,72%
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	4.328.188.300,00	4.050.263.723,00	277.924.577,00	92,43%
	BELANJA BARANG DAN JASA	5.926.720.502,00	5.621.578.888,00	305.141.614,00	94,85%
	BELANJA HIBAH	40.494.100.000,00	40.481.075.000,00	13.025.000,00	99,97%
5.2.	BELANJA MODAL	342.553.000,00	342.216.000,00	337.000,00	99,90 %
5.2.1.	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	157.553.000,00	157.516.000,00	37.000,00	99,98%
5.2.2.	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	185.000.000,00	184.700.000,00	300.000,00	99,84%
5.2.3.	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	0,00	0,00	0	0%
JUMLAH BELANJA		51.145.561.802,00	50.495.133.611,00	650.428.191,00	98,73%
SURPLUS / (DEFISIT)		(51.145.561.802,00)	(50.495.133.611,00)	(650.428.191,00)	98,73%

Dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran tersebut, berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2023. Realisasi dana pada anggaran tersebut tercapai 98,73%.

1. Akuntabilitas Keuangan

Tahun 2023 secara keseluruhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan Anggaran sebesar Rp.51.145.561.802,- dan terealisasi sebesar Rp.50.495.133.611 sisa sebesar Rp.650.428.191,- atau tercapai sebesar 98,73%. Dengan pelaksanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) dan Urusan Pemerintahan Umum). Pelaksanaan urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) pada Tahun 2023 dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, 6 (enam) kegiatan, 22 (dua puluh dua) sub kegiatan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.5.541.084.602,- dan terealisasi sebesar Rp.5.116.798.963,- sisa sebesar Rp.424.285.639,- atau tercapai sebesar 92,34%.

Sementara Urusan Pemerintahan Umum pada Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan melalui 5 (lima) Program, 5 (Lima) Kegiatan dan 19 (Sembilan Belas) Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.45.604.477.200,- dan terealisasi sebesar Rp.45.378.334.648,- sisa pagu Rp.226.142.552,- atau tercapai sebesar 99,50%.

3.5. Inovasi

Inovasi yang sudah di dilaksanakan adalah adanya aplikasi website siormas, untuk pelayanan pendaftaran Ormas

Gambar. 3.1.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi selama tahun anggaran 2023. Laporan tersebut merupakan implementasi dari Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dapat disimpulkan keberhasilan sasaran di tahun 2023 yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan rencana, menunjukkan capaian rata-rata indikator kinerja sasaran baik.

Dari hasil pengukuran kinerja terlihat bahwa secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pada Tahun Anggaran 2023 telah berupaya mencapai target kinerja sasaran dan kegiatan serta telah dapat memenuhi fungsi yang dibebankan pada organisasi dari 4 (Empat) sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Meskipun secara rata-rata capaian sasaran dan kegiatan sangat baik, namun belum seluruh target kinerja sasaran maupun kegiatan dapat dicapai seperti yang diharapkan. Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor lingkungan baik internal misalnya sosialisasi, mengukur, mencatat dan melaporkan kinerja yang terjamin integritas data dan ketepatan waktunya mesti terus ditingkatkan, maupun lingkungan eksternal misalnya kerjasama, sinergi dan kualitas komunikasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta lembaga atau pihak-pihak lainnya yang harus terus ditingkatkan, dengan demikian kinerja organisasi terutama capaian sasaran diharapkan dapat dicapai sesuai rencana yang ditetapkan.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Sangat disadari masih diperlukan perbaikan agar dapat mempertahankan bahkan untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai organisasi. Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk tahun-tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang lebih baik dari setiap jajaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, maka diperlukan :

1. Terwujudnya pencapaian Indikator kinerja kegiatan dan indikator program sehingga tergambaranya keberhasilan pencapaian program/kegiatan di masing-masing unit kerja pelaksana kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa.
2. Peningkatan pengkoordinasian di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik baik penyusunan perumusan kebijakan dan program kerja dalam pelaksanaan operasional pemerintah daerah.